

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu contoh peningkatan pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui nilai pertumbuhan ekonomi. Nilai pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah (Mubarok, 2019). Pembangunan yang berlangsung secara estafet dan berkesinambungan dalam rangka perubahan ke arah yang lebih baik. Pembangunan dapat diorientasikan pada 3 hal, yaitu peningkatan ketersediaan dan pemerataan kebutuhan primer masyarakat, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk memperoleh hak nya dalam ekonomi maupun sosial (Todaro, 1998). Indonesia terdiri dari banyak wilayah dengan struktur ekonomi yang berbeda satu sama lain. Struktur perekonomian tercermin dari peran/kontribusi masing-masing sektor ekonomi. Untuk dapat mengetahui potensi pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah di Indonesia diperlukan suatu metode yang berguna untuk mengevaluasi dan memprediksi pertumbuhan ekonomi daerah. Dasar teori ekonomi basis didasarkan pada pandangannya bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah tergantung pada sejauh mana pertumbuhan ekspor daerah tersebut (Darwin, 2016).

Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga secara umum potensi pengembangan masing-masing daerah sangat berbeda, baik dari segi geografi, sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kondisi ekonomi, sosial

dan budaya juga membuat kapasitas daerah untuk tumbuh dan berkembang berbeda dari daerah ke daerah (Setiawan, 2020). Kesejahteraan suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan struktur ekonominya dan faktor inilah yang menjadi faktor utama. Perubahan dari suatu daerah ke keadaan yang lebih sejahtera tergantung pada usaha daerah tersebut dalam produksi barang dan jasa, serta upaya pembangunan yang diperlukan (Nur & Safaringa, 2019). Konsolidasi dan Pelebaran pada setiap sektor basis pada tiap tiap daerah menjadi hal yang wajib untuk mengatasi berbagai beragam masalah baik itu permasalahan ekonomi dan sosial di daerah yang di katakan dengan kondisi tertinggal dan terbelakang untuk meningkatkan potensi daerah guna untuk menggiatkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan perkapita daerah.

وَالِى تَمُوَدَ آخَاهُمْ صٰلِحًاۙ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ
 غَيْرِهٖۗ هُوَۙ اَنْشَاكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا
 اِلَيْهِۗ اِنَّ رَّبِّيۗ لَاقْرَبُۢ مُجِيبٌ [Hud (11) : 61]

Terjemahan : dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).”

Bedasarkan penggalan ayat dari SURAT HUD ayat 11 diatas allah mengajarkan bahwa pentingnya kita umat islam untuk menjaga *restabling* ekonomi dan memastikan pertumbuhan ekonomi guna memakmurkan kepada seluruh umat.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan hasil dari nilai bersih barang dan jasa-jasa yang sudah di akumulasikan dan diolah dari berbagai macam kegiatan pada sektor perekonomian pada suatu regional dan waktu periode yang sudah di tentukan. PDRB menandakan suatu daerah apakah dapat mengolah dan menggunakan sumber daya alam yang ada di daerah dengan maksimal atau tidak. Dikarenakan hal tersebut Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan suatu regional amat bersenandung dengan pada potensi sumber daya alam yang ada dan dengan faktor-faktor produksi.

Bedasarkan Undang-undang Republik indonesia Nomor 32 tahun tentang tugas dan wewenang pemerintah daerah, Pemda memiliki hak yang besar untuk mendalangi dan mengolah berbagai macam urusan Pengolahan sumber daya alam guna untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pembangunan nasional menghendaki adanya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan keutuhan negara kesatuan, daerah memiliki hak otonomi dalam mengatur dan memelihara rumahnya sendiri. Baik dalam penyelenggaraan negara maupun dalam pelayanan masyarakat. Sesuai dengan asas otonomi dan tanggung jawab daerah yang luas dan murni, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah dilimpahkan kepada daerah secara bertahap, pengembangan potensi daerah masing-masing daerah dan pengembangan sumber keuangan daerah menjadi tanggung jawab daerah dan tanggung jawab pemerintah pusat (Syamsurijal, Suhel, 2005).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses yang meliputi pembentukan institusi baru, pengembangan industri alternatif dan kreatif,

peningkatan kapasitas tenaga kerja yang ada guna untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, mengidentifikasi pasar baru, transfer pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha baru. Pembangunan ekonomi oleh pemerintah Pertumbuhan dan perubahan, karena tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, selain itu juga akan mengubah perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah (Ristanti & Handoyo, 2017). Menurut Todaro indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang sudah di didirikan dapat ditandai oleh tiga hal berikut, yaitu pertama meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer, kedua meningkatnya harga diri dari masyarakat itu sendiri, dan ketiga kemampuan masyarakat untuk memilih meningkat.

Kabupaten Bantul adalah satu dari beberapa kabupaten yang berada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan memberi pengaruh cukup besar bagi PDRB Provinsi Yogyakarta. Kabupaten Bantul memiliki sumber daya alam yang sangat beragam berupa lahan pertanian, air, tambang berupa pasir, kerikil, tanah liat, batu gamping, dan sumber daya alam lainnya, dan kabupaten Bantul memiliki sumber daya memiliki yang melimpah, dan berkualitas, Jika ditinjau dari letak geografis nya Kabupaten Bantul mempunyai kawasan yang strategis guna melaksanakan pembangunan ekonomi dalam rangka guna peningkatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bantul. Sektor-sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupten Bantul pada periode tahun 2012 - 2020 terdiri dari : pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah,

daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil/motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi, makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estat, administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial, jasa Pendidikan, jasa Kesehatan, kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Di provinsi DI Yogyakarta sendiri terdiri dari beberapa Kabupaten yakni, Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta yang pada setiap kabupaten memiliki potensinya masing-masing tersendiri tergantung kondisi daerah nya masing-masing sehingga akan memiliki tingkat pertumbuhan PDRB yang berbeda-beda yang dapat dilihat pada table di bawah;

Tabel 1. 1. PDRB Provinsi DIY menurut kabupaten tahun periode 2012-2021
Berdasarkan Harga Konstan 2010 dalam Nilai PDRB (Miliar rupiah)

No	Kabupaten / Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kulonprogo	5.475	5.741	6.004	6.281	6.580	6.973	7.727	8.770	8.414	8.778
2	Gunungkidul	9.695	10.177	10.640	11.152	11.696	12.282	12.915	13.605	13.511	14.216
3	Bantul	13.407	14.138	14.851	15.588	16.375	17.210	18.151	19.155	18.838	19.773
4	Sleman	23.957	25.367	26.713	28.098	29.563	31.140	33.138	35.287	33.906	35.786
5	Kota Yogyakarta	19.189	20.239	21.307	22.393	23.536	24.768	26.127	25.285	24.670	26.003
6	PDRB	71.702	75.627	79.539	83.474	87,685	92,300	98,024	104.485	101,686	107.308

Sumber : BPS Yogyakarta, 2022

Pada Tabel diatas Kabupaten Bantul memiliki PDRB no 3 setelah Peranan sumbangsi dari berbagai sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantul terus mengalami perubahan pada peranan tiap sektor yang ada dikarenakan oleh berbagai faktor yang ada. Besarnya kontribusi dari tiap sektor yang ada terhadap PDRB kabupaten Bantul dapat dilihat pada table dibawah ini:

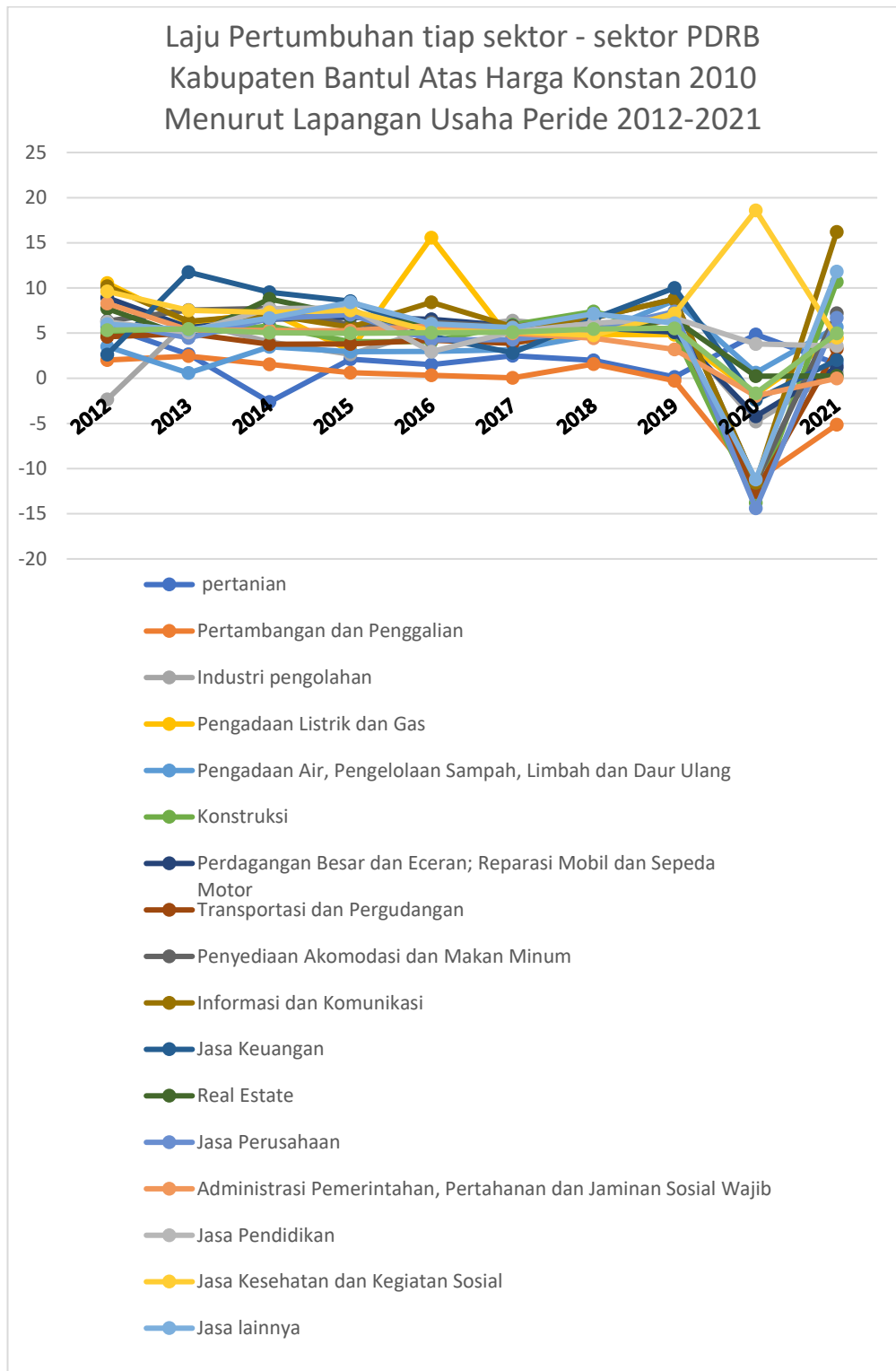
Tabel 1. 2. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Dalam Persen) 2012-2020

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.38	15.34	14.46	14.60	14.33	13.85	13.63	13.07	14.12	13,64	14,24 2
2	Pertambangan dan Penggalian	0.71	0.66	0.66	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.47	0,42	0,58
3	Industri pengolahan	15.12	15.44	15.50	15.06	15.21	15.25	15.22	15.18	14.84	14,45	15,12 7
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.12	0.10	0.11	0.11	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0,14	0,127
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0,08	0,083
6	Konstruksi	9.51	9.37	9.35	9.33	9.29	9.38	9.72	9.75	8.50	8,99	9,319
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.52	8.35	8.33	8.20	8.47	8.61	8.69	8.65	8.46	8,18	8,446
8	Transportasi dan Pergudangan	4.97	4.89	4.95	4.87	4.79	4.74	4.72	4.85	4.45	4,41	4,764
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.32	10.97	11.38	11.59	11.67	11.73	11.69	11.92	10.73	11,16	11,31 6
10	Informasi dan Komunikasi	8.35	7.95	7.62	7.30	7.32	7.38	7.32	7.27	8.74	9,65	7,89
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.48	2.58	2.73	2.82	2.80	2.77	2.83	2.94	2.88	2,87	2,77
12	Real Estate	6.35	6.25	6.46	6.53	6.58	6.57	6.56	6.71	6.90	6,58	6,549
13	Jasa Perusahaan	0.52	0.48	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.49	0.43	0,43	0,476
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.95	7.11	7.27	7.41	7.55	7.77	7.73	7.63	7.72	7,45	7,459
15	Jasa Pendidikan	6.79	6.65	6.83	7.10	6.87	6.82	6.80	6.90	7.39	7,29	6,944

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.81	1.80	1.79	1.84	1.85	1.85	1.81	1.85	2.28	2,27	1,915
17	Jasa lainnya	2.03	1.96	1.98	2.01	1.98	2.01	2.04	2.05	1.86	1,97	1,989
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2022

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa dari periode tahun 2012-2020 rata-rata kontribusi dari 17 sektor ekonomi. Sektor yang paling tinggi kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bantul adalah Industri Pengolahan dengan total kontribusi sebesar 15,32% kemudian diikuti oleh Sektor Pertanian sebesar 14,37% serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,19%; Konstruksi sebesar 9,37%; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Sebesar 8,44%; Informasi dan Komunikasi Sebesar 7,75%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Sebesar 7,30%; Jasa Pendidikan Sebesar 6,90%; Real Estate sebesar 6,51%; Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,83%; Jasa Keuangan dan Asuransi Sebesar 2,72%; Jasa lainnya Sebesar 1,99%; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Sebesar 1,86%; Pertambangan dan Penggalian Sebesar 0,61%; Jasa Perusahaan Sebesar 0,48%; Pengadaan Listrik dan Gas Sebesar 0,12%; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Sebesar 0,084%.



Gambar 1. 1 : Laju Pertumbuhan tiap sektor – sektor PDRB Kabupaten Bantul Atas Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Periode 2012-2021

Pada data Grafik menunjukkan dimana pergerakan laju pertumbuhan dari 17 Sektor Ekonomi, dari 17 Sektor yang ada Sektor yang paling tinggi laju pertumbuhannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul pada periode 2012-2021 adalah Sektor Informasi dan Komunikasi dengan laju pertumbuhan sebesar 9,30% kemudian diikuti oleh; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,70%; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,88%; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,61%; Jasa Pendidikan sebesar 5,50%; Jasa lainnya sebesar 5,18%; Real Estate sebesar 5,10%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,04%; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,80%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,10%; Konstruksi sebesar 3,91%; Jasa Perusahaan sebesar 3,79%; Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,63%; Industri pengolahan sebesar 2,92%; Transportasi dan Pergudangan 2,78%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,05% dan; Pertambangan dan penggalan sebesar minus -0,812%.

B. Rumusan Masalah

1. Mengidentifikasi sektor apa yang menjadi sektor basis di kabupaten Bantul pada periode 2012-2021 ?
2. Menganalisis pergeseran sektor apa saja yang berubah pada setiap sektor ekonomi kabupaten bantul selama 10 tahun (2012 – 2021) ?
3. Mengidentifikasi sektor mana sajakah yang masuk pada klasifikasi sektor maju, maju namun tertekan, potensial, dan tertinggal ?

4. Bagaimana strategi kebijakan untuk sektor basis, unggulan, dan maju serta sektor – sektor yang potensial untuk di kembangkan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis sektor apa saja yang menjadi sektor basis di kabupaten Bantul.
2. Mengetahui pergeseran sektor ekonomi apa saja yang berubah pada periode 2012 -2021.
3. Menganalisis dan memberikan masukan strategi kebijakan untuk sektor basis, unggulan dan maju serta potensial di kabupaten Bantul di berdayakan.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui sektor basis dan potensial untuk di kembangkan di kabupaten Bantul pada periode 2012-2021.
2. Sebagai rujukan strategi untuk pemerintah daerah Bantul dalam pengambilan arah kebijakan ekonomi pada tiap tiap sektor ekonomi yang basis, unggulan, maju dan potensial.
3. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh para peneliti di masa mendatang sebagai informasi.